



## Memahami Desa Wisata Berkelanjutan Berbasis Partisipasi Masyarakat

Muhammad Lukman Hakim<sup>1\*</sup>, Nita Aribah Hanif<sup>2</sup>, Sierfi Rahayu<sup>3</sup>, Tiwi Riskiyani<sup>4</sup>, Yeni Khoirunnisa Agustiani<sup>5</sup>, Dwisapto Yusuf Pradana<sup>6</sup>, Fat'chatus Chanifa Jikhan<sup>7</sup>

<sup>1\*,3,4,5,6,7</sup> Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 42163, Banten-Indonesia

<sup>2</sup> Ilmu Pemerintahan, Universitas Pamulang, 42163, Banten-Indonesia

\*[Muhammad.Lukman@untirta.ac.id](mailto:Muhammad.Lukman@untirta.ac.id)

### INFO ARTIKEL

#### Info Publikasi:

Research Article

Dikirim: 15 Desember 2025;

Diterima: 10 Februari 2026;

Dipublikasi: 27 April 2026;

*This is an open-access article.*

*License: Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)*

#### How to cite:

Lukman, M. ., Hanif, N. A., Rahayu, S., Riskiyani, T., Agustiani, Y. K., Pradana, D. Y., & Jikhan, F. C. (2026). Memahami Desa Wisata Berkelanjutan Berbasis Partisipasi Masyarakat. *Journal of Social Contemplativa*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.61183/jsc.v4i1.128>

Copyright © 2026. Owned by Author(s), published by JSC

### ABSTRAK



ngembangan desa wisata berkelanjutan berbasis partisipasi masyarakat menjadi strategi krusial dalam transformasi pariwisata Indonesia menuju model yang lebih inklusif dan resilien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dimensi keberlanjutan dan dinamika partisipasi masyarakat dalam ekosistem desa wisata melalui tinjauan literatur dan metode yang digunakan adalah kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sering kali masih berada pada level *tokenism* (informing and consultation) menurut Tangga Arnstein, di mana keterlibatan substantif dalam pengambilan keputusan masih terbatas. Sinergi antara Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berperan penting dalam manajemen konflik dan distribusi manfaat ekonomi secara adil. Meskipun instrumen kebijakan nasional telah mengacu pada standar global (GSTC), tantangan berupa rendahnya kapasitas SDM, keterbatasan modal, dan risiko komodifikasi budaya tetap menjadi hambatan utama. Penelitian menyimpulkan bahwa transformasi menuju desa wisata mandiri memerlukan penguatan literasi digital (Tourism 5.0) dan integrasi nilai kearifan lokal seperti Tri Hita Karana untuk menjamin keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan.

**Abstract** The development of sustainable tourism villages based on community participation is a crucial strategy in transforming Indonesian tourism towards a more inclusive and resilient model. This study aims to analyze the dimensions of sustainability and the dynamics of community participation in the tourism village ecosystem through a literature review and qualitative methods. The findings indicate that community participation often remains at the level of *tokenism* (informing and consultation) according to Tangga Arnstein, where substantive involvement in decision-making is still limited. Synergy between Tourism Awareness Groups (Pokdarwis) and Village-Owned Enterprises (BUMDes) plays a crucial role in conflict management and the equitable distribution of economic benefits. Although national policy instruments have referred to global standards (GSTC), challenges such as low human resource capacity, limited capital, and the risk of cultural commodification remain major obstacles. The study concludes that the transformation towards independent tourism villages requires strengthening digital literacy (Tourism 5.0) and integrating local wisdom values such as Tri Hita Karana to ensure a balance between economic, socio-cultural, and environmental aspects.

**Kata Kunci:** Desa Wisata; Berkelanjutan; Partisipasi Masyarakat

## 1. Pendahuluan

Kepariwisata Indonesia berada pada titik balik fundamental dalam sejarah pengembangannya. Pergeseran dari pariwisata massal (*mass tourism*) yang cenderung eksploitatif terhadap sumber daya alam dan marginal terhadap keterlibatan lokal, menuju model pariwisata alternatif yang lebih humanis dan ekologis, telah menempatkan desa wisata sebagai episentrum pertumbuhan baru (Darmayasa et al., 2025). Konsep desa wisata bukan sekadar tren sesaat, melainkan manifestasi dari integrasi antara daya tarik wisata—baik alam, budaya, maupun buatan manusia—dengan struktur kehidupan masyarakat yang tetap menjunjung tinggi kearifan local (Meitasari et al., 2026). Definisi desa wisata dalam konteks ini mencakup kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana otentik, mulai dari arsitektur tata ruang yang khas hingga aktivitas ekonomi unik yang mampu menarik minat wisatawan domestik maupun internasional (Budiatiningsih et al., 2024).

Transformasi ini dipercepat oleh perubahan preferensi wisatawan global pascapandemi, yang kini mengalihkan fokus mereka pada konsep NEWA (*Nature, Eco-Tourism, Wellness Tourism, dan Adventure Tourism*). Wisatawan modern tidak lagi hanya mencari hiburan visual, tetapi mendambakan pengalaman yang menawarkan koneksi mendalam dengan alam dan cara hidup masyarakat setempat. Hal ini memberikan posisi strategis bagi desa wisata untuk menjadi motor penggerak ekonomi yang tangguh terhadap gejolak global, sekaligus menjadi benteng pelestarian budaya. Pembangunan desa wisata dalam paradigma berkelanjutan mensyaratkan bahwa kebutuhan saat ini harus terpenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk menikmati sumber daya yang sama. Oleh karena itu, prinsip keberlanjutan tidak boleh dipandang secara sempit sebagai isu lingkungan semata, melainkan harus mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan tata kelola yang inklusif (Wulandari, 2024).

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur (*literature review*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam kompleksitas, konteks, dan berbagai perspektif yang terkait dengan kebijakan. Jenis penelitian yang diterapkan adalah studi literatur (*library research*). Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menghimpun, menganalisis, dan

mensintesis berbagai sumber ilmiah yang relevan guna memberikan pemahaman komprehensif mengenai praktik terbaik dan teori pengembangan desa wisata berkelanjutan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari (Huberman & Miles, 2002). Model ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan dan berkelanjutan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

#### 1. Reduksi Data (Data Reduction)

Menyaring, menyederhanakan, dan mengklasifikasikan data mentah dari berbagai literatur sesuai dengan tema partisipasi dan keberlanjutan.

#### 2. Penyajian Data (Data Display)

Menyusun data yang telah disaring ke dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel untuk mempermudah pemahaman pola-pola yang ditemukan.

#### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Mengembangkan tema dan makna dari hasil sintesis literatur untuk menjawab rumusan masalah mengenai model partisipasi masyarakat yang ideal.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Pendekatan utama yang digunakan dalam mengoperasionalkan desa wisata berkelanjutan di Indonesia adalah *Community Based Tourism* (CBT). CBT didefinisikan sebagai kegiatan pariwisata yang dimiliki, dioperasikan, dan dikelola oleh masyarakat setempat untuk kepentingan komunitas itu sendiri. Prinsip dasar CBT menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama, bukan sekadar penonton atau objek pembangunan. Melalui pemberdayaan, CBT bertujuan untuk memperkuat kemampuan organisasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui mata pencaharian yang berkelanjutan serta perlindungan terhadap nilai-nilai tradisi dan sumber daya alam (Okazaki, 2008).

Secara teoretis, implementasi CBT harus memenuhi lima dimensi utama yang dipromosikan oleh badan dunia seperti UNEP dan WTO. Ketidakseimbangan dalam salah satu dimensi ini dapat menyebabkan kegagalan dalam mencapai status desa wisata berkelanjutan (Suansri, 2003). Sebagai contoh, desa wisata yang hanya mengejar

keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan pelestarian budaya sering kali berakhir pada komodifikasi yang merusak integritas identitas lokal.

Dimensi CBT	Fokus Utama dan Indikator Keberhasilan
<b>Ekonomi</b>	Penciptaan lapangan kerja, timbulnya pendapatan tambahan, dan adanya dana khusus untuk pengembangan komunitas.
<b>Sosial</b>	Peningkatan kualitas hidup, penguatan rasa bangga terhadap identitas lokal, dan distribusi manfaat yang adil antar warga.
<b>Budaya</b>	Pelestarian adat istiadat, perlindungan warisan fisik dan tak benda, serta terjadinya pertukaran budaya yang saling menghargai.
<b>Lingkungan</b>	Kesadaran akan konservasi sumber daya alam, pengelolaan limbah yang efektif, dan perlindungan keanekaragaman hayati.
<b>Politik</b>	Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, transparansi tata kelola, dan adanya kendali lokal atas pembangunan.

Keberlanjutan ekonomi dalam CBT sering kali diukur melalui sejauh mana pariwisata mampu memberikan nilai tambah bagi ekonomi pedesaan tanpa mengaburkan struktur ekonomi yang sudah ada, seperti pertanian atau kerajinan. Di sisi lain, dimensi lingkungan menuntut agar aktivitas wisata selaras dengan daya dukung (*carrying capacity*) dan daya tampung lingkungan untuk mencegah degradasi ekosistem akibat lonjakan kunjungan wisatawan (Blackstock, 2005).

### Tipologi dan Dinamika Partisipasi Masyarakat Menggunakan Analisis Tangga Arnstein

Partisipasi masyarakat merupakan ruh dari pengembangan desa wisata berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat sering kali bersifat fluktuatif dan bervariasi dalam hal kedalamannya. Untuk memahami fenomena ini, para peneliti sering merujuk pada teori "Tangga Partisipasi Masyarakat" (*Ladder of Citizen Participation*) yang dikembangkan oleh Sherry Arnstein. Teori ini membagi partisipasi ke dalam delapan anak tangga yang dikelompokkan menjadi tiga level utama: *non-participation*, *tokenism*, dan *citizen power*

Analisis terhadap berbagai desa wisata di Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas partisipasi masih berada pada level *tokenism*, khususnya pada tangga *informing* (pemberian informasi) dan *consultation* (konsultasi). Pada level ini, masyarakat memang diundang ke pertemuan dan diberikan informasi mengenai rencana pembangunan, namun mereka tidak memiliki kekuasaan nyata untuk mengubah keputusan yang telah dibuat oleh elit pengelola atau pemerintah. Masyarakat sering kali hanya diposisikan sebagai objek yang harus menyetujui program, alih-alih subjek yang merumuskan program tersebut

Level Partisipasi (Arnstein)	Karakteristik dalam Pengembangan Desa Wisata
<b>Non-Participation</b>	Masyarakat hanya dimanipulasi atau diberikan "terapi" agar setuju dengan agenda pihak luar tanpa memahami substansi program.
<b>Tokenism</b>	Masyarakat didengar suaranya (konsultasi) dan diberi informasi, namun tidak ada jaminan bahwa masukan mereka akan diimplementasikan dalam kebijakan.
<b>Citizen Power</b>	Masyarakat memiliki kendali penuh atau setidaknya kekuasaan yang didelegasikan untuk mengelola sumber daya dan mengambil keputusan strategis.

Bentuk partisipasi masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama: partisipasi buah pikiran (*ide/gagasan*), tenaga fisik (*gotong royong*), harta benda (*kontribusi aset atau dana*), dan keterampilan (*keahlian teknis*). Di desa-desa dengan ikatan sosial yang kuat, partisipasi tenaga fisik sering kali menjadi bentuk yang paling dominan dan optimal karena selaras dengan budaya gotong royong pedesaan. Namun, tantangan besar muncul pada tahap pengawasan dan evaluasi, di mana minat masyarakat cenderung rendah karena dianggap sebagai ranah teknis pengelola

### Kerangka Regulasi dan Standarisasi Nasional

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah menyusun instrumen kebijakan yang komprehensif untuk memastikan arah pembangunan pariwisata yang responsif terhadap dinamika global.

Copyright © 2026. Owned by Author(s), published by **Journal of Social Contemplativa**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

Rencana Strategis Kemenparekraf 2025-2029 menekankan pada pendekatan perencanaan yang menyeluruh, berbasis daya dukung lingkungan, dan melibatkan kolaborasi pentahelix – pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat lokal, dan media . Salah satu alat ukur utama yang diperkenalkan adalah Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (IPKN), yang bertujuan untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam *Travel and Tourism Development Index* (TTDI) global (Vivi et al., 2026).

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah menyusun instrumen kebijakan yang komprehensif untuk memastikan arah pembangunan pariwisata yang responsif terhadap dinamika global. Rencana Strategis Kemenparekraf 2025-2029 menekankan pada pendekatan perencanaan yang menyeluruh, berbasis daya dukung lingkungan, dan melibatkan kolaborasi pentahelix – pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat lokal, dan media. Salah satu alat ukur utama yang diperkenalkan adalah Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (IPKN), yang bertujuan untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam *Travel and Tourism Development Index* (TTDI) global (Uyar et al., 2023).

Kriteria penilaian sertifikasi mencakup:

1. **Pengelolaan Berkelanjutan:** Keberadaan organisasi pengelola yang profesional (seperti Pokdarwis atau BUMDes), perencanaan jangka panjang, dan sistem monitoring dampak pariwisata
2. **Keberlanjutan Sosial Ekonomi:** Distribusi manfaat ekonomi yang adil, dukungan terhadap produk lokal, dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas bagi warga desa
3. **Keberlanjutan Budaya:** Upaya perlindungan warisan budaya fisik maupun tak benda, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat
4. **Keberlanjutan Lingkungan:** Efisiensi penggunaan energi dan air, pengelolaan sampah yang terpadu, dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati local
5. Selain itu, Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) berfungsi sebagai katalisator untuk mendorong desa-desa wisata meningkatkan klasifikasi mereka dari kategori rintisan dan berkembang menuju kategori maju dan mandiri. Target nasional pada

tahun 2024 adalah mencapai 244 desa wisata mandiri yang mampu mengelola potensinya secara mandiri dan berkelanjutan

### **Sinergi Pokdarwis dan BUMDes**

Keberhasilan partisipasi masyarakat sangat bergantung pada efektivitas kelembagaan di tingkat desa. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah dua institusi kunci yang memiliki peran berbeda namun saling melengkapi dalam ekosistem pariwisata pedesaan. Pokdarwis umumnya merupakan lembaga informal yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan pariwisata di daerahnya. Tugas utamanya bersifat fasilitatif, yakni menyosialisasikan sadar wisata, membangun keswadayaan masyarakat, dan menjadi penggerak dalam penciptaan produk wisata yang kreatif (Saputra & Kamindang, 2024).

Di sisi lain, BUMDes berfungsi sebagai badan hukum yang mengelola potensi ekonomi desa secara kolektif. Dalam konteks desa wisata, BUMDes sering kali berperan sebagai pengelola aset-aset fisik wisata, penyedia modal bagi unit usaha kecil masyarakat, dan penjamin distribusi keuntungan pariwisata bagi pendapatan asli desa. Sinergi yang kuat antara Pokdarwis (sebagai penggerak sosial) dan BUMDes (sebagai pengelola bisnis) menjadi prasyarat bagi terciptanya kemandirian desa. Namun, konflik sering muncul apabila batasan wewenang antara kedua lembaga ini tidak jelas, atau terjadi kecenderungan elitisme di mana hanya pengurus lembaga yang menikmati manfaat finansial, sehingga masyarakat umum merasa teralienasi dari proses Pembangunan (Maharani et al., 2024)

### **Analisis Komponen 4A dan Strategi Pengembangan Produk Wisata**

Pembangunan desa wisata yang berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari kesiapan infrastruktur dan produk wisata yang ditawarkan. Formula klasik dalam pengembangan destinasi adalah pemenuhan komponen 4A: Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas, dan Ancillaries, yang kini harus didukung oleh kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul (Echtner, 2002).

1. **Atraksi (Daya Tarik):** Desa harus mampu menggali keunikan yang tidak dimiliki tempat lain, baik berupa lanskap alam yang eksotis, tradisi budaya yang masih murni, maupun kerajinan tangan yang memiliki nilai filosofis tinggi.
2. **Aksesibilitas:** Kemudahan bagi wisatawan untuk menjangkau lokasi mencakup kondisi jalan, ketersediaan transportasi umum, serta integrasi digital melalui sistem penunjuk arah berbasis GPS.
3. **Amenitas (Fasilitas):** Sarana penunjang kenyamanan wisatawan seperti homestay yang menyatu dengan rumah warga (memberikan pengalaman hidup ala orang desa), toilet bersih, dan ketersediaan sinyal telekomunikasi.
4. **Ancillaries (Kelembagaan):** Ketersediaan organisasi yang menjamin keteraturan pelayanan, keamanan, dan penanganan keluhan wisatawan secara profesional

Kesiapan SDM lokal menjadi faktor determinan yang menggerakkan keempat komponen tersebut. Kemenparekraf menekankan pentingnya penguasaan teknologi digital bagi SDM desa wisata untuk menghadapi tren pariwisata masa depan yang semakin terkoneksi secara global. Pengembangan SDM juga diarahkan pada perspektif *Green HRM*, yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam manajemen tenaga kerja pariwisata desa untuk memastikan dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalisir sejak dari tahap operasional paling dasar

### **Studi Kasus: Implementasi Tri Hita Karana di Desa Wisata Penglipuran**

Desa Wisata Penglipuran di Bali menjadi salah satu contoh sukses dunia dalam mengintegrasikan nilai-nilai luhur dengan pariwisata modern. Keberhasilan Penglipuran berakar pada konsistensi masyarakat dalam mengaplikasikan konsep filosofis Tri Hita Karana—harmonisasi hubungan antara manusia dengan Tuhan (*Parahyangan*), sesama manusia (*Pawongan*), dan alam (*Palemahan*). Tata letak desa yang terbagi menjadi tiga zona suci dan hutan bambu yang dilindungi merupakan bentuk nyata dari konservasi lingkungan berbasis adat. Desa Wisata Penglipuran di Bali menjadi salah satu contoh sukses dunia dalam mengintegrasikan nilai-nilai luhur dengan pariwisata modern. Keberhasilan Penglipuran berakar pada konsistensi masyarakat dalam mengaplikasikan konsep filosofis Tri Hita Karana—harmonisasi hubungan antara manusia dengan Tuhan (*Parahyangan*), sesama manusia (*Pawongan*), dan alam (*Palemahan*). Tata letak desa yang

terbagi menjadi tiga zona suci dan hutan bambu yang dilindungi merupakan bentuk nyata dari konservasi lingkungan berbasis adat (Kirani et al., 2022).

### Peluang dan Risiko Konflik Horizontal

Pengembangan desa wisata membawa dampak ganda yang memerlukan manajemen konflik yang cermat. Secara positif, pariwisata meningkatkan taraf hidup penduduk, mengurangi arus migrasi ke kota, dan membangkitkan kebanggaan akan warisan leluhur. Di berbagai lokasi, pariwisata telah membuka lapangan kerja bagi perempuan melalui usaha katering dan pengelolaan homestay, serta bagi pemuda melalui jasa pemanduan wisata. Pengembangan desa wisata membawa dampak ganda yang memerlukan manajemen konflik yang cermat. Secara positif, pariwisata meningkatkan taraf hidup penduduk, mengurangi arus migrasi ke kota, dan membangkitkan kebanggaan akan warisan leluhur. Di berbagai lokasi, pariwisata telah membuka lapangan kerja bagi perempuan melalui usaha katering dan pengelolaan homestay, serta bagi pemuda melalui jasa pemanduan wisata.

Jenis Dampak	Manifestasi Positif	Risiko dan Dampak Negatif
<b>Ekonomi</b>	Peningkatan pendapatan, terciptanya lapangan kerja baru, tumbuhnya UMKM lokal.	Ketimpangan pendapatan, kenaikan harga barang pokok lokal, ketergantungan ekonomi pada pariwisata.
<b>Sosial</b>	Penguatan solidaritas (gotong royong), peningkatan akses pendidikan dan kesehatan.	Konflik horizontal antar kelompok pengelola, kecemburuan sosial, pergeseran gaya hidup konsumtif.
<b>Budaya</b>	Pelestarian tradisi dan seni lokal, peningkatan rasa bangga atas identitas desa.	Komodifikasi budaya (budaya hanya sebagai tontonan), hilangnya makna religius pada tradisi sakral.
<b>Lingkungan</b>	Peningkatan kesadaran pelestarian alam, perbaikan sistem sanitasi desa.	Pencemaran sampah wisatawan, alih fungsi lahan hijau menjadi fasilitas wisata, kerusakan ekosistem sensitif.

## Strategi Menuju Desa Wisata Mandiri dan Inovatif

Untuk mengatasi berbagai tantangan di atas, diperlukan langkah-langkah strategis yang terintegrasi. Pertama, penguatan kelembagaan melalui pelatihan manajemen konflik dan transparansi keuangan sangat penting untuk menjaga kepercayaan Masyarakat (Agu et al., 2024). Kedua, diversifikasi produk wisata melalui paket-paket wisata edukasi dan ekonomi kreatif dapat meningkatkan nilai tambah tanpa harus meningkatkan jumlah wisatawan secara drastis (fokus pada *high value* daripada *mass tourism*) (Nusraningrum & Pratama, 2019). Ketiga, pemanfaatan teknologi digital melalui strategi Tourism 5.0 harus segera diimplementasikan (Vujičić et al., 2024). Hal ini mencakup penggunaan data besar (*big data*) untuk menganalisis tren wisatawan, pemasaran berbasis *storytelling* di media sosial, dan penyediaan sistem pembayaran digital untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan. Terakhir, dukungan pemerintah harus bergeser dari sekadar fasilitator menjadi regulator yang mampu menjamin kepastian hukum terkait pengelolaan aset wisata oleh masyarakat desa

### 4. Simpulan

Pengembangan desa wisata berkelanjutan berbasis partisipasi masyarakat di Indonesia adalah sebuah proses evolusioner yang menuntut keseimbangan antara ambisi ekonomi dan komitmen pelestarian. Partisipasi masyarakat bukan sekadar formalitas kehadiran dalam rapat, melainkan keterlibatan substantif dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada ruang hidup mereka sendiri. Melalui pendekatan CBT yang konsisten, didukung oleh kelembagaan lokal yang transparan seperti Pokdarwis dan BUMDes, desa wisata dapat tumbuh menjadi pilar ketahanan nasional yang mandiri dan berdaya saing global. Namun, keberlanjutan tidak akan tercapai selama partisipasi masyarakat masih tertahan pada level *tokenism* dan manfaat pariwisata hanya terkonsentrasi pada segelintir elit. Rekomendasi ke depan mencakup perlunya peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan berkelanjutan, penguatan regulasi mengenai hak kelola masyarakat atas aset desa, serta integrasi teknologi digital yang tetap berpijak pada kearifan lokal. Dengan strategi yang tepat, desa wisata tidak hanya akan menjadi destinasi yang menarik bagi pelancong, tetapi juga menjadi tempat tinggal yang lebih baik bagi masyarakatnya, di mana harmoni antara manusia, budaya, dan alam tetap terjaga untuk generasi yang akan datang

## 5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

## 6. Pernyataan Conflicting Interests

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepegangannya, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## References

- Agu, J. C., Nkwo, F. N., & Eneiga, R. U. (2024). Governance and anti-corruption measures in Nigeria: Strategies for enhancing transparency, accountability and public trust. *International Journal of Economics and Public Policy*, 8(1), 1–15.
- Blackstock, K. (2005). A critical look at community based tourism. *Community Development Journal*, 40(1), 39–49.
- Budiatiningsih, M., Putri, B. P., & Dini, M. F. (2024). Keberhasilan penerapan konsep pariwisata berbasis masyarakat: Studi kasus di Desa Wisata Nglanggeran. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 13(1), 123–136.
- Darmayasa, D., Wulandari, P. P., Tirtawati, N. M., Farid, F., Putra, A. M., Bestari, N. M. P., Rante, M. W., Sudiarta, I. N., Kusuma, K. A. A. W., & Kasim, M. (2025). *Regenerative Tourism: Transformasi Ekowisata Masa Depan*. Star Digital Publishing.
- Echtner, C. M. (2002). The content of Third World tourism marketing: a 4A approach. *International Journal of Tourism Research*, 4(6), 413–434.
- Huberman, M., & Miles, M. B. (2002). *The qualitative researcher's companion*. sage.
- Kirani, N., Kharisma, I. W. W., Asih, N., Saraswati, N., Ratihningsih, N. K. S., & Suryandari, N. N. A. (2022). Tri Hita Karana sebagai ideologi kehidupan masyarakat Bali dalam pengembangan desa wisata Penglipuran Bali. *Journal of Tourism and Interdisciplinary Studies*, 2(2), 60–70.
- Maharani, A. E. P., Haningati, G. C. S., & Dewangga, M. A. (2024). The Strategi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Desa Wisata melalui BUMDES: Strategi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Desa Wisata melalui Badan Usaha Milik Desa. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 5(2), 198–223.

- Meitasari, D., Rayesa, N. F., Prasetyaningrum, D. I., Dewi, H. E., Laili, F., & Mutisari, R. (2026). *Merancang Masa Depan Desa Wisata: Pariwisata Berbasis Komunitas dan Inovasi Sosial di Pedesaan Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.
- Nusraningrum, D., & Pratama, A. (2019). The tourism development through creative economy. *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, 8(6), 300–308.
- Okazaki, E. (2008). A community-based tourism model: Its conception and use. *Journal of Sustainable Tourism*, 16(5), 511–529.
- Saputra, M. A., & Kamindang, I. (2024). Kapasitas Kelembagaan Kelompok Sadar Wisata dalam Pengembangan Desa Wisata Kampung Merah Putih di Desa Kaleke, Kabupaten Sigi. *CENDEKIA: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 1(9), 527–540.
- Suansri, P. (2003). *Community based tourism handbook*. Responsible Ecological Social Tour-REST Bangkok.
- Uyar, A., Kuzey, C., Koseoglu, M. A., & Karaman, A. S. (2023). Travel and tourism competitiveness index and the tourism sector development. *Tourism Economics*, 29(4), 1005–1031.
- Vivi, V., Judijanto, L., Samuel, S., & Sepriano, S. (2026). *Pariwisata Indonesia: Inovasi dan Strategi Pariwisata Berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Vujičić, M. D., Stankov, U., Basarin, B., Krejtz, I., Krejtz, K., & Masliković, D. (2024). Accessibility in tourism 5.0 approach: Enabling inclusive and meaningful tourist experiences. In *Transforming media accessibility in europe: Digital media, education and city space accessibility contexts* (pp. 3–20). Springer.
- Wulandari, L. W. (2024). Optimization of the NEWA-based tourism development model (Nature, Ecotourism, Wellness, and Adventure) through the eco-wellness tourism concept approach. *Eduvest-Journal of Universal Studies*, 4(8), 6907–6919.

## Tentang Penulis

**Author 1**, Dosen di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa program Studi Administrasi Publik

**Author 2**, Dosen di Universitas Pamulang, Program Studi Ilmu Pemerintahan

**Author 3**, Dosen di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa program Studi Administrasi Publik

**Author 4**, Dosen di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa program Studi Administrasi Publik

**Author 5**, Dosen di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa program Studi Administrasi Publik

